

LAPORAN FINAL
PENELITIAN UNGGULAN PERGURRUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2014



**Membongkar Korupsi Politik Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris
(*Asymetrical Decentralization*) Pada Provinsi - Provinsi Istimewa di Indonesia
(Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi)**

Tahun II (dua) dari rencana 5 (lima) tahun

Dr. M. Fadli, SH, MH	NIDN : 0001046502
Dr. Jazim Hamidi, SH, MH	NIDN : 0016116601
Joko Purnomo, S.IP, MA	NIDN : 0001047807
Fachrizal Afandi, S.Psi, SH, MH	NIDN : 0009048105

Dibiayai oleh:
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya

Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2014, tanggal 5 Desember 2013, dan berdasarkan SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 157 Tahun 2014 tanggal 10 april 2014

UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOVEMBER 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Membongkar Korupsi Politik Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris (*Asymetrical Decentralization*) Pada Provinsi - Provinsi Istimewa di Indonesia (*Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi*)

Peneliti/Pelaksanaan
Nama Lengkap : Dr. M. Fadli, SH, MH
NIDN : 00010465002
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Hukum
Nomor HP : 081333161111
Alamat email : mfadlifh@ub.ac.id , mfadlifhub@yahoo.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : Dr. Jazim Hamidi, SH, MH
NIDN : 0016116601
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Anggota (2)
Nama Lengkap : Joko Purnomo, S.IP, MA
NIDN : 0001047807
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya


Anggota (4)
Nama Lengkap : Fachrizal Afandi, S.Psi, SH, MH
NIDN : 0009048105
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 5 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 150.000.000,00

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Shabudin, SH, MH
NIP. 19591216 198503 1 001

Malang, 9 November 2014
Ketua Peneliti,


Dr. Moh. Fadli, SH, MH
NIP. 19650401 199002 1001

Menyetujui,
PPM UB

Prof. Dr. Ir. Woro Busono, MS
19560403 198103 1 002

ABSTRAK PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kerawanan korupsi dan pelaksanaan desentralisasi asimetris di pada provinsi - provinsi istimewa di Indonesia. *Outcome* dari penelitian ini adalah terbangunnya desain model antisipasi merebaknya korupsi di daerah. Hingga saat ini belum ada mekanisme yang ditemukan untuk mengukur kerawanan korupsi dengan mengungkap konsep *Corruption Vulnerability Index* (CVI). Pada tahun kedua, penelitian ini akan dilaksanakan di tiga provinsi istimewa di Indonesia, dengan rincian: (1) Provinsi DI Yogyakarta; (2) Provinsi DI Aceh; dan (3) Provinsi DKI Jakarta. Pilihan wilayah penelitian ini didasarkan pada keistimewaan yang dimiliki tiap-tiap daerah dalam sistem otonomi dan pelaksanaan desentralisasi asimetris. Adanya fenomena penyalahgunaan wewenang oleh pegawai daerah (PNS) dan kewenangan istimewa yang melekat di daerah dalam penerbitan peraturan daerah, program kebijakan dan model pemerintahan yang dipilih menentukan tingkat dan corak modus korupsi yang terjadi. Hal ini perlu untuk diteliti lebih jauh apakah kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki daerah-daerah tersebut memberikan *incentive* dan *disincentive* bagi kerentanan korup di level lokal.

Keyword: korupsi politik, desentralisasi asimetris, provinsi-provinsi istimewa, *corruption vulnerability index*.

RINGKASAN

Penelitian Membongkar Korupsi Politik Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris (*Asymmetrical Decentralization*) Pada Provinsi-Provinsi Istimewa di Indonesia (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi) yang dilaksanakan di Provinsi DIY, DI Aceh dan DKI Jakarta. Pada tahun kedua, penelitian ini fokus pada analisa peran Gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi dalam menjalankan kepemimpinan serta kontribusi LSM anti korupsi di daerah dalam upaya mengurangi dan/atau memberantas korupsi di daerah.

Secara umum terdapat beberapa temuan penting dari penelitian yang kami laksanakan. *Pertama*, tindak pidana korupsi di level lokal terjadi seiring dengan berlangsungnya otonomi daerah. Keleluasaan daerah untuk merancang, menentukan dan melaksanakan proses pembangunan sebagai konsekuensi dari implementasi otonomi daerah pada titik tertentu membuka ruang bagi hadirnya korupsi di level lokal. *Kedua*, tindak pidana korupsi di level lokal dipengaruhi oleh sejauh mana komitmen dan infrastruktur anti korupsi tersedia di tingkat daerah baik di level pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan. *Ketiga*, keterkaitan antara kekhususan dan keistimewaan pemerintahan provinsi dengan tingkat korupsi daerah masih belum diketemukan. Masih perlu didalami lebih dahulu tentang peran kepemimpinan perempuan dalam mengurangi tindak pidana korupsi atau memperanta tingkat korupsi di level lokal.

Pada penelitian ini juga diketemukan bahwa arah pelaksanaan otonomi daerah lebih fokus pada pencapaian ekonomi. Kebutuhan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat tahun per tahun, kebutuhan pelaksanaan pelayanan publik seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan serta kebutuhan untuk melakukan pembangunan di daerah mendorong pemerintah daerah, termasuk kepala daerah provinsi istimewa, untuk lebih berorientasi pada pencapaian ekonomi.

Pada akhirnya, penelitian ini menemukan urgensinya pada kurangnya instrumental infrastruktur anti korupsi di level lokal. Pada titik inilah penelitian ini menemukan relevansinya dalam rangka berkontribusi pada pencapaian hasil positif dari otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen Laporan

Alhasan-Alolo, N 2007, *Gender and Corruption: Testing the New Consensus*, Publik Administration and Development.

Anjaneyulu & Manickam 2007, *Environmental Impact Assessment Methodology*, BS Publication, Hyderabad.

Annual Report Tahun 2013, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh.

Antonius Sujata, *Korupsi, Koruptif, dan Tindak Pidana Korupsi*, Artikel Majalah Hidup Nomor 21 Tahun ke-58 tanggal 23 Mei 2004.

Antonius Sujata, *Korupsi, Koruptif, dan Tindak Pidana Korupsi*, Artikel Majalah Hidup Nomor 21 Tahun ke-58 tanggal 23 Mei 2004.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh, Opini WDP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013, hlm. 1.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2013, No. 53/11/TH XVI, 6 November 2013.

Benny K Harman, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan*, Opini dimuat dalam Media Indonesia, 9 Oktober 2009.

Berg, B.L., 2001, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences (4th edition)*, Pearson Education Company, Needham Heights

BPKP DI Yogyakarta, *Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah pada Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012*. Nomor: Lap-18/PW12/1/2013, 22 Januari 2013.

BPS Provinsi DI Yogyakarta, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2013*, Penerbit BPS, 2013.

BPS Provinsi DIY, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2013*.

Daniar Supriyadi, Zihan Syahayani dan Dzakkiyah RU, *Strategi Pemberantasan Perilaku Koruptif Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Reformasi*

Prosedur Administrasi, Laporan Hasil Penelitian, tidak diterbitkan, FH UB, 2011.

David Dollar, Raymond Fisman dan Roberta Gatti, 1999, *Are Women Really the "Fairer" Sex? Corruption and Women in Government*, World Bank,

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika

Hasrul Halili, dkk, *Rubuhnya Pengadilan Kami*, Penerbit Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM berkerjasama dengan Open Institute Society (OSI), 2009.

Hery Nurudin MM, CFE, Paparan Anggota Penyidik KPK pada Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis 22/10/2014.

Isa Wahyudi, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Malang Raya, Malang Corruption Watch (MCW), hlm. 2.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Tinjauan Ekonomi & Keuangan Daerah Provinsi Aceh, 2012, hlm. 6.

Laporan *International Corruption Watch* (ICW) dalam Syamsul Halim berjudul "*Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", Makasar, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2013 Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Aceh

Leo Agustino:2010, Dinamika Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten, dalam LP3ES, *Otonomi Daerah untuk Siapa?*, Prisma Vol. 29, No. 3, 2010

Mas'ud Said 2008, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2008

Rusdianto S., Status Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, hlm. 11-13.

- Syamsul Haling 2008, Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi) Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassa
- Syarif Hidayat 2010, Mengurai Peristiwa-Meretas Karsa: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dalam LP3ES, *Otonomi Daerah untuk Siapa?*, Prisma Vol. 29, No. 3, 2010
- Vedi Hadiz 2003, *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives*, Working Papers Series No. 47, City University of Hong Kong: Southeast Asia Research Center.
- Vivi Alatas, Lisa Cameron, Ananish Chaudhuri, Nisvan Erkal,¹ and Lata Gangadharan, 2009; *Gender, Culture, and Corruption: Insights from an Experimental Analysis Southern Economic Journal* 2009, 75(3), 663–680
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie (eds) 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia, Jakarta

Artikel Internet

- Agnes Harvelian, 28 Februari 2014, *Hambatan Pengelolaan Dana Atas Otonomi Khusus di Provinsi Aceh*, <http://www.hukumpedia.com>, diakses 6 November 2014.
- Agus, 19 Agustus 2013, *10 Provinsi Indonesia Diduga Paling Korup*, <http://m.menit.tv/welcome/read/2013/08/19/9035/0/20/10-Provinsi-Indonesia-Diduga-Paling-Korup>, diakses 6 November 2014.
- Anton Widyanto, *Korupsi dan Dunia Pendidikan*, Kamis, 2 Mei 2013, www.aceh.tribunnews.com, diakses 6 November 2014.
- BPS Aceh, *Aceh dalam Angka-Geografis*, <http://aceh.bps.go.id/>, diakses 5 November 2014.
- Hafiz, 20 Januari 2014, *Visi Dan Misi Gubernur Aceh Periode 2012-2017*, <http://acehprov.go.id/index.php/page/11/visi-dan-misi.html>, diakses 5 November 2014.
- Hafiz, 30 Juni 2014, *Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Aceh*, <http://acehprov.go.id/>, diakses 5 November 2014.

Ismoko Widjaya, Dedy Priatmojo, 1 November 2012, *Malu Dicap Provinsi Korup, Gubernur Aceh Temui KPK*, <http://nasional.news.viva.co.id>, diakses 6 November 2014.

Johanes Basuki dalam Edy 'Idhu Mulyawan, *Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam upaya mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Baik*, Artikel, 3 Juni 2010,

<http://idhulaw.wordpress.com>, diakses 9 Mei 2014

Mohammad Najib, *Mencegah Korupsi Itu Sangat Mudah*, Selasa, 29 Januari 2014, www.aceh.tribunnews.com, diakses 6 November 2014.

Muhammad Mirza Ardi, *'Seuramoe' Korupsi*, Selasa, 18 Oktober 2011, www.aceh.tribunnews.com, diakses 6 November 2014.

Syukriy Abdullah, *Korupsi dan Anggaran di Aceh*, Selasa, 6 Mei 2014, www.aceh.tribunnews.com, diakses 6 November 2014.

Tegar Arief Fadly, 1 Oktober 2012, *Inilah Daftar 15 Provinsi Terkorup*, <http://news.okezone.com/read/2012/10/01/339/697217/inilah-daftar-15-provinsi-terkorup>, diakses 5 November 2014.

Tribunnews, *Kejari Se-Aceh Selamatkan Uang Korupsi Rp 28 M Lebih*, Rabu, 23 Juli 2014, www.aceh.tribunnews.com, diakses 6 November 2014. Tribunnews, *Potensi Korupsi di Balik Temuan BPK*, Rabu, 18 Juni 2014, www.aceh.tribunnews.com, diakses 6 November 2014.

Yusrizal, *Berharap KPK ke Aceh*, Selasa, 6 Mei 2014, www.aceh.tribunnews.com, diakses 6 November 2014.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan

Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Qanun Aceh No. 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2013

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014

Media massa

Detiknews

Kompas

Okezone News

TribunNews

Wikipedia dengan sumber rujukan yang terpercaya dan valid

Website Lembaga:

BPS Jakarta, Aceh, Yogyakarta, dan BPS Pusat

BPK RI

KPPOD

Pemerintah Provinsi Aceh

Pemerintah Provinsi Jakarta

Pemerintah Provinsi Yogyakarta

Portal LSM Anti Korupsi Di Aceh, Yogyakarta dan Jakarta

UNCED

WECD